

Subordinasi perempuan di bidang politik yang diakibatkan oleh budaya politik patriarki di masyarakat dan parpol serta berbagai hambatan yang muncul dari dalam diri perempuan sendiri mendorong aktivis perempuan dari berbagai macam parpol untuk membentuk Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Fokus kerja mereka adalah pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan dengan melalui dua strategi yakni advokasi dan *capacity building*. Fokus advokasi mereka adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Sementara *capacity building* dilakukan untuk meningkatkan kapasitas politik dan legislasi anggota-anggotanya. Untuk mengetahui bagaimana KPPI melakukan program-program pemberdayaan politiknya, maka dilakukanlah penelitian untuk melihat sejauh mana kedua strategi tersebut mendatangkan hasil dan manfaat bagi anggota KPPI dan perempuan secara umum.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi dan *capacity building* KPPI dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan yang terfokus pada keterwakilan perempuan di parpol dan parlemen. Serta menganalisis sejauhmana hasil dan manfaat yang bisa didapatkan dari kedua strategi tersebut dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan penelusuran dokumen.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa KPPI belum bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan *civil society* yang ideal untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan ketergantungan pendanaannya kepada *funding agency* bernama *National Democratic Institute* (NDI) untuk setiap program-program pemberdayaan yang mereka selenggarakan. Sehingga kondisi ini membuat kegiatan pemberdayaan KPPI menjadi *project oriented*. KPPI juga masih eksklusif dan elitis dalam geraknya sehingga tidak mampu membuka diri dan memperluas jaringan ke OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) lain, padahal sinergisitas antar masyarakat sipil sangat diperlukan dalam sebuah pemberdayaan. Banyaknya program dan dana ternyata juga belum bisa memberikan manfaat bagi perempuan *grassroot* karena KPPI hanya fokus di tingkat elite perempuan parpol saja. Sehingga, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen belum bisa diiringi dengan banyaknya dukungan perempuan *grassroot* terhadap wakil-wakil perempuan mereka yang berada di legislatif.

Kata Kunci : pemberdayaan, *capacity building*, advokasi, keterwakilan

Women subordination in the political field which is caused by patriarchy political culture in the society and political party as well as many barriers that come from the women themselves promote women activist from many political parties to establish *Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)*. Their job focus is the empowerment of women's politics which is done through two strategies; they are advocacy and capacity building. Their advocacy focus is motivating 30% of women representatives in political institution and political party. In addition, capacity building is done to increase the political and legislation capacity their members. In order to know how does KPPI run its political empowerment program, a research is conducted to reveal how far both of these strategies resulted and give benefits for KPPI members and women in general.

The problem that will be analyzed in this research is how are the advocational strategies and *capacity building* of KPPI in running women political empowerment which is focused in representability of women in political party and parliament.. It is also done to analyze how far the result and benefits that can be gained from both strategies by executing qualitative research. The technique of data collecting is done through deep interview, library research, and documentary traces.

The results of analysis shows that KPPI can not be named yet as an ideal *civil society* movement to conduct women empowerment. It is caused by its financial dependence to *funding agency* named *National Democratic Institute (NDI)* for each of empowerment programs that they run. Consequently this condition make empowerment program of KPPI becoming *project oriented*. KPPI also exclusive and elitist in its activities, so it can not open itself and enlarging its network to other Civil Society Organization, in fact the synergicity among civil societies are needed in an empowerment. A lots of programs and fundings are not able to give benefits to *grassroot women* because KPPI only focus on elitist of political party women level only. So, the increase of women number in parliament can not be followed by women supports of *grassroot* to women representative in legislative.

Key words : *empowerment, capacity building, advocacy, representability*